

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Review Penelitian Terdahulu

Ilmiani & Sutrisno (2014) meneliti tentang pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur. Untuk mengukur variabel, penelitian tersebut menggunakan Tobin's Q, *Cash ETR* dan indeks pengungkapan sukarela. Hasil uji statistik t pada penelitian tersebut yaitu variabel *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa semakin tinggi *tax avoidance* maka semakin rendah nilai perusahaan yang berarti bahwa semakin tinggi *tax avoidance* maka semakin rendah nilai perusahaan. Kemudian, variabel transparansi mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka nilai perusahaan akan lebih meningkat.

Karimah & Taufiq (2014) meneliti tentang Pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Untuk mengukur variabel, penelitian tersebut menggunakan Tobin's Q, *Cash ETR*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis adalah analisis jalur (*path*). Berdasarkan analisis penelitian tersebut hasilnya yaitu *tax avoidance* jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* jangka panjang dan *tax avoidance* jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Chasbiandani & Martani (2012) meneliti tentang pengaruh *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan pada seluruh perusahaan yang terdaftar

dalam bursa efek Indonesia kecuali untuk sektor perbankan dan keuangan. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Tobin's Q dan *cash ETR*. Berdasarkan analisis penelitian tersebut hasilnya yaitu *short run tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *long run tax avoidance*. *Long run tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan *short run tax avoidance* tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan semakin rendah ETR jangka panjang yang dibayarkan oleh perusahaan, nilai perusahaan akan semakin tinggi.

Tarihoran (2016) meneliti tentang pengaruh penghindaran pajak dan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang dimoderasi oleh transparansi perusahaan. Untuk mengukur variabel, penelitian tersebut menggunakan Tobin's Q, *Cash ETR* dan indeks pengungkapan sukarela. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga melakukan uji residual. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa variabel Penghindaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena kecenderungan investor untuk tidak melihat berapa besar pajak yang dibayarkan perusahaan sehingga tidak terlalu mempertimbangkan besarnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan nilai penghindaran pajak juga diikuti oleh meningkatnya nilai perusahaan. Hal ini terjadi apabila penghindaran pajak dapat meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian, variabel transparansi perusahaan dapat memoderasi penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena

perusahaan menyajikan informasi yang cukup, akurat dan memadai. penghindaran pajak yang tinggi berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Dengan tingkat transparansi yang tinggi, maka tingkat kepercayaan investor pada perusahaan akan semakin tinggi karena investor beranggapan bahwa perusahaan merupakan perusahaan yang baik karena telah mengungkapkan sebagian besar informasi yang mereka miliki dan menunjukkan seberapa berkualitasnya laporan keuangan yang dihasilkan.

Tandean & Jonathan (2015) meneliti tentang pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan current ETR dan Tobin's Q dengan teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji model. Hasil penelitian adalah *tax avoidance* yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan semakin meningkat. Semakin rendah *effective tax rate* (ETR) sebuah perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaanya.

Victory & Cheisviyani (2015) meneliti tentang pengaruh *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini yaitu efek *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan adalah positif dan signifikan pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dan manfaat yang akan diterima atas imbal jasa aktivitas tersebut lebih tinggi dibanding dengan biaya yang akan dikeluarkan.

B. Kajian Teori

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak disebut prinsipal (*principal*) yang menyewa pihak lain yang disebut agen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini pihak prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada agen. Prinsipal memberikan tanggung jawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingan prinsipal, termasuk dalam pendelegasian otoritas pengambilan keputusan. Kontrak tersebut seringkali dibuat berdasarkan angka laba bersih, sehingga dapat dikatakan bahwa teori agensi mempunyai implikasi terhadap akuntansi.

Hubungan prinsipal dan agen sering ditentukan dengan angka akuntansi. Hal ini memicu agen untuk memikirkan bagaimana akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan agen adalah dengan melakukan manajemen pajak.

Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut, Zain (2008) menyimpulkan ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontrapretasi) individual dan pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. *Tax avoidance* adalah suatu tindakan yang legal. Terdapat perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* tidak melanggar perundang-undangan dan hanya memanfaatkan celah kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sedangkan *tax evasion* merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (Zain, 2007).

Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak ilegal:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran

Menurut Suandy (2003) *tax avoidance* adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* dapat terjadi di dalam ketentuan/tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang. Komite urusan fiskal dari OECD menyebutkan ada tiga karakteristik *tax avoidance*, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Dengan demikian dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Aktivitas penghindaran pajak akan menimbulkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk yang ada dalam perusahaan atau bahkan menyesatkan investor (Simarmata, 2014).

Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan saat ini adalah meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari kemakmuran pemilik atau pemegang saham perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga pasar sahamnya (Simarmata, 2014). Kenaikan harga saham akan memberikan keuntungan dan kemakmuran bagi pemegang saham.

Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan manajemen. Nilai perusahaan merupakan hal penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi investor menilai perusahaan secara keseluruhan. Christiawan dan Tarigan, (2007) menjelaskan beberapa nilai suatu perusahaan sebagai berikut:

- a. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.

- b. Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- d. Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- e. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi.

Tobin's Q merupakan salah satu proksi untuk mengukur nilai perusahaan. Tobin's Q dikembangkan oleh James Tobin (1967) dan dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam kegiatan perusahaan seperti terjadinya perbedaan *crossectional* dalam pengambilan keputusan investasi (Simarmata, 2014).

Semakin besar nilai Tobin's Q maka semakin besar nilai perusahaan dan mengindikasikan perusahaan memiliki prospek yang baik. Hal ini karena nilai pasar aset perusahaan lebih besar dibandingkan nilai buku aset perusahaan yang berarti

semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut.

Transparansi Perusahaan

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan resiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, semakin transparan perusahaan maka akan mengurangi perilaku kecurangan manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Transparansi mampu menghasilkan operasional perusahaan lebih transparan dan mengurangi kemampuan penghindaran pajak. Dimana transparansi perusahaan diukur dari banyaknya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan.

Hendrikson & Breda (dikutip dalam Melyana 2015) mengemukakan bahwa pengungkapan sukarela adalah tindakan dari perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk menaikkan tingkat luas pengungkapan keuangan dengan tidak adanya paksaan dari pemerintah maupun badan profesi akuntansi.

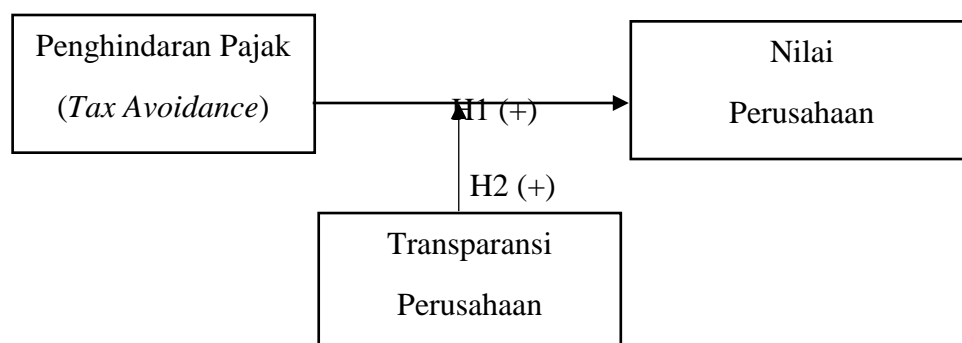
C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan, maka peneliti mengindikasikan bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga dengan adanya teori agensi, maka manajemen sebagai agen akan berupaya meminimalkan pajak terutang perusahaan agar laba yang didapat maksimal dan manajemen mendapat kompensasi yang besar. Perusahaan akan mengerahkan sumber daya yang dimiliki agar beban pajak yang dibayarkan semakin kecil.

Disisi lain, perusahaan umumnya ingin meningkatkan nilai perusahaannya. Hal ini untuk memakmurkan para pemegang saham. Jika nilai perusahaan tinggi, maka pemegang saham akan mempertahankan investasinya dan calon investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Bagi pemegang saham sebagai *principal* yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan jika diketahui perusahaan melakukan penghindaran pajak yang ilegal, pemegang saham mempunyai hak untuk menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut (Simarmata, 2014). Oleh sebab itu, transparansi informasi perlu dilakukan oleh perusahaan.

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran



D. Pengembangan Hipotesis

Menurut Dyreng, et. al (2008) *tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. *Tax avoidance* di proksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil (Herdiyanto, 2015).

Tax Avoidance dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajemen terlihat baik dimata pemegang saham. Manajemen dalam mengambil sebuah keputusan seharusnya memperhatikan manfaat dan biaya yang akan diperoleh oleh perusahaan. Chasbiandani dan Martani (2012), menyebutkan bahwa pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen dan manfaat yang akan diterima atas imbal jasa aktivitas tersebut lebih tinggi dibanding dengan biaya yang akan dikeluarkan.

Dalam teori agensi dimana pemegang saham selaku *principal* memberikan tanggung jawab kepada manajemen (agen) untuk mengelola perusahaan. Adanya pemisahan manajemen perusahaan dari pemilik, dimana hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan mempekerjakan agen profesional di dalam perusahaan.

Ketika manajemen mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan pajak, berarti semakin sedikit beban yang akan dikeluarkan perusahaan. Hal ini

akan berdampak pada laba perusahaan yang meningkat karena beban yang dikeluarkan semakin kecil. Faktor tersebut yang akan meningkatkan investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Semakin banyak investor yang menanamkan saham pada perusahaan maka harga saham juga akan meningkat.

Dari penelitian Ilmiani & Sutrisno (2014) menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan yang didukung oleh penelitian Tarihoran (2016) yang menyatakan bahwa pengindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, menurut penelitian Tandean & Jonathan (2015) *tax avoidance* yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan semakin meningkat. Semakin rendah *cash effective tax rate* (CETR) sebuah perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditandai dengan semakin rendahnya nilai *cash effective tax rate* (CETR)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Transparansi dapat meningkatkan dan memperlemah nilai perusahaan karena kandungan informasi yang disajikan lebih banyak. Perilaku *tax avoidance* dapat berdampak pada menurunnya nilai

perusahaan. Namun, manajer perusahaan berharap dengan meningkatnya transparansi perusahaan dapat mencegah turunnya nilai perusahaan. Transparansi pada laporan keuangan diharapkan dapat membantu investor memahami informasi dan membantu dalam mengambil keputusan investasi yang akhirnya mempengaruhi harga saham atau nilai perusahaan (Torihoran, 2016).

Teori agensi dalam penelitian ini dapat menunjukkan adanya asimetri informasi bila terjadi konflik kepentingan pada saat melakukan praktik perencanaan pajak. Hal ini dapat diminimalisir dengan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya adalah menggunakan pengungkapan informasi yang lebih transparan (Armstrong *et al.*, 2013). Transparansi ini dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan dan dapat mengurangi dampak dari konflik kepentingan serta memberikan nilai yang baik bagi perusahaan.

Transparansi diukur dengan seberapa banyak pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan secara sukarela. Hendrikson & Breda (dikutip dalam Melyana 2015) mengemukakan bahwa pengungkapan sukarela adalah tindakan dari perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk menaikkan tingkat luas pengungkapan keuangan dengan tidak adanya paksaan dari pemerintah maupun badan profesi akuntansi.

Dari penelitian Ilmiani & Sutrisno (2014) menunjukkan dan transparansi perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang didukung oleh penelitian Tarihoran (2016) yang transparansi perusahaan dapat memoderasi penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

H2 : Transparansi mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

